

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TRIWULAN III TAHUN 2019
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

I. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Rencana Kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri,
- d. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/249/IV/2019/Tipidkor tanggal 16 April 2019 tentang Tim Pokja Pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka mempertahankan predikat WBK dab menuju WBBM Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
- e. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/478/VIII/2019/Tipidkor tanggal 26 Agustus 2019 tentang Tim Pokja Pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka mempertahankan predikat WBK dab menuju WBBM Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
- f. Hasil Monev SOP Triwulan II Dittipidkor Bareskrim Polri tanggal 3 Juli 2019.

II. PELAKSANAAN

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi Triwulan III terhadap SOP yang telah ada yaitu:

- a. Pelaksanaan sosialisasi maupun evaluasi dapat dilaksanakan pada saat apel bersama, sehingga dapat lebih efisien dan dihadiri oleh seluruh personel.

- b. Terus melaksanakan evaluasi secara berkala pelaksanaan terhadap semua SOP yang berlaku pada Dittipidkor Bareskrim Polri.
- c. Membuat/menyusun inovasi SOP lain yang dianggap perlu/dibutuhkan bagi setiap personel Dittipidkor Bareskrim Polri
- d. Berkoordinasi dengan Biro Renmin Bagbinfung Bareskrim Polri dalam penyusunan dan pelaksanaannya.

III. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi terhadap SOP ini harus dilaksanakan secara berkala guna mengetahui sejauh mana SOP tersebut digunakan oleh personel.

IV. PENUTUP

Demikian tindak lanjut Monev terhadap SOP Triwulan III ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 17 Oktober 2019
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI